

ISSN No. 0125-169X

ORYZA Vol. IX, No.2 September 2010



# ORYZA

*majalah ilmiah universitas mataram*



isi di dalam menjadi tanggung jawab penulis

## **SUSUNAN REDAKSI**

### **Pelindung**

Prof. Ir. H. Sunarpi, Ph.D. (Rektor Universitas Mataram)

### **Pengarah**

Drs. Syahdan, M.Ed., Ph.D. (Pembantu Rektor I Unram)

### **Ketua**

Ir. Ahmad Zaini, M.A, Ph.D.

### **Sekretaris**

Drs. H. Muhibbah Nasruddin, M.Sc.

### **Anggota**

Agusdin, SE., MBA., DBA

Dr. Sudirman Willian, M.A.

Ir. Herman Suheri, M.Sc., Ph.D.

Akmaluddin, ST, M.Sc (Eng). Ph.D.

Lalu Parman, SH., MH.

Drs. Teguh Ardianto, M.Si.

dr. Ardiana Ekawanti

### **Ketata Usahaan :**

Koordinator

Zainal Abidin, SH., M.Si

### **Anggota**

Mustajib, ST.

Drs. I Nyoman Oka SAdiyadnya

Fariati Majrun, S.Sos.

### **Sirkulasi**

Nursan

M. Zam Zam

SK. Rektor Universitas Mataram

No. 12314/H18.H/HK.00.01/2010 Tanggal 29 September 2010

### **Alamat Redaksi :**

Sub. Bagian Sarana Pendidikan Universitas Mataram

Jalan Majapahit No. 62 Telp. (0370) – 63307 - 63 Fax. 636041

Mataram - NTB.

# DAFTAR ISI

<b>I. BIDANG ILMU PERTANIAN</b>		
1.	ANALISIS DAYA SAING TEMBAKAU VIRGINIA MELALUI POLICY ANALYSIS MATRIX DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR oleh Anwar.....	1
2.	OPTIMALISASI POTENSI SUMBERDAYA USAHATANI UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN PETANI DI WILAYAH LAHAN KERING KABUPATEN SUMBAWA oleh Broto Handoko.....	12
3.	ANALISIS PENDAPATAN DAN KELAYAKAN USAHATANI JAGUNG DI KECAMATAN GERUNG KABUPATEN LOMBOK BARAT Adnan H. Muhammad dkk. ....	29
<b>II. BIDANG ILMU PETERNAKAN</b>		
4.	FISIOLOGI DAN REGULASI EKSPRESI GEN BONE MORFOGENETIC PROTEIN-15 PADA SISTEM REPRODUKSI HEWAN MAMMALIA oleh Maskur .....	39
<b>III. BIDANG ILMU TEKNIK</b>		
5.	KUAT LENTUR PLAT LANTAI KOMPOSIT KAYU-BETON AGREGAT RINGAN DENGAN CAMPURAN SERAT IJUK oleh Miko .....	53
6.	PENERAPAN MANAJEMEN LALU LINTAS DI SEKITAR PASAR KEBON ROEK MATARAM DITINJAU DARI KINERJA RUAS JALAN DAN SIMPANG oleh Desi Widiaty .....	67
7.	PENGARUH RASIO TULANGAN TERHADAP KEKAKUAN LENTUR BALOK BETON BERTULANG BERPENAMPANG T oleh Akmaluddin.....	79
8.	KARAKTERISTIK KEKUATAN BENDING KOMPOSIT BATANG POHON PISANG DENGAN Matrik <i>POLYESTER</i> oleh Nasmi Herlinasari .....	92
<b>IV. BIDANG ILMU KEDOKTERAN</b>		
9.	PROFIL STATUS GIZI BALITA BAWAH GARIS MERAH DI WIL.KERJA PUSKESMAS SENGKOL, KEC.PUJUT,KAB.LOTENG oleh Lina Nurbaiti, Deasy I. ...	101
10.	PREVALENSI KECACINGAN DAN STATUS GIZI PADA ANAK SEKOLAH DASAR DI LOMBOK TIMUR oleh Novrita Padauleng, Devi Rahmadonam, Emmy Amalia .....	108
11.	TINGKAT KEBISINGAN DI SEKITAR BANDARA YANG BEROPERASI DAN BANDARA YANG AKAN BEROPERASI DI LOMBOK SABAGAI BAGIAN DARI PENCEGAHAN DAMPAK KEBISINGAN oleh Hamsu Kadriyan .....	113
12.	PERBANDINGAN EFEKTIVITAS PIPERAZIN DAN ALBENDAZOL SEBAGAI ANTIHELMENTIK TERHADAP TRICHURIASIS oleh Herpan Sayafia Harahap dkk. ...	121
<b>VI. BIDANG ILMU PENDIDIKAN</b>		
13.	ISOLASI $\beta$ -SITOSTEROL DARI KAYU BATANG <i>Artocarpus Scortechinii</i> King (Moraceae) oleh Aliefman Hakim .....	129
14.	IMPLEMENTASI DESENTRALISASI ( Otonomi Daerah saat ini dan prospeknya) oleh Rispawati .....	135
<b>VIII. BIDANG ILMU EKONOMI</b>		
15.	ANALISIS BEBERAPA FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PER ( <i>PRICE EARNINGS RATIO</i> ) PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG <i>LISTED</i> DI BURSA EFEK JAKARTA PERIODE 2003 – 2005 oleh Handry Sudiartha Athar dan I KM. Sekar W.S. ...	145
16.	POSISI RELATIF SEKTOR EKONOMI NUSA TENGGARA BARAT TERHADAP SEKTOR EKONO-MI NASIONAL MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2002 – 2007 oleh Satarudin dan Muhammad Alwi .....	156
17.	KAJIAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN ANTAR DAERAH MODEL REGIONAL MANAGEMENT oleh Yusuf Hasbullah dan Sahri .....	168
18.	ANALISIS TATANIAGA PENGUSAHAAN DAN PEMASARAN BEBERAPA KOMODITI/PRODUK UNGGULAN DI PULAU LOMBOK oleh Agusdin .....	189
19.	PERSEPSI <i>AUDITOR</i> DAN <i>AUDITEE</i> TERHADAP INFORMASI DALAM LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT oleh Rr. Sri Pancawati Martiningsih .....	204

## **KAJIAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN ANTAR DAERAH MODEL REGIONAL MANAGEMENT**

**Yusuf Hasbullah dan Sahri**

Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Mataram

### **ABSTRACT**

*The title of this research is The Study of the Regional Management Model of the Interregional Development Expansion, aiming at finding out the forms of RMPS (Regional Manajemen Pulau Sumbawa: The Regional Management of Sumbawa Island) cooperation in optimizing the productive economic potentials through the policy of regional development expansion, and finding out the alternative model of expanding the regional development through regional management (RM). The research is conducted in the regencies throughout Sumbawa island, covering the regencies of West Sumbawa, Sumbawa, Bima, Dompu, and the Municipality of Bima. The research is explorative. The data collection method employed is specific method, i.e. limited on specific things. The data analysis instrument is least square method, and the regional economic analysis instruments, such as overly, proxy, and comparative methods.*

*The research findings show that the economic growth in RMPS regions varies in the year 2003-2008. The lowest value was found in Dompu with the average of 3.67%, followed by Bima (4.48%), Sumbawa (4.52%) and Bima City (4.55%). The highest was found in West Sumbawa Regency, KSB (5.54%). The economic structure in the RMPS regions is still dominated by the agricultural sector in the wide sense. The contribution amount of the agricultural sector in 2008 in KSB was 31.78%; Sumbawa, 42.84%; Dompu, 41.49; Bima, 52.14%; and the smallest is in Bima City, 21.35%.*

*After the formation of RMPS in August 2006, the sector agreed to be cooperated was agriculture in wide sense, especially animal farming sub-sector. Viewed from several indicators, cow farming has a bigger leverage power than other big animal farming (e.g. buffalo and horse) to boost the economic growth in the RMPS regions. The cow farming in the regions is conducted through shepherding in the Lar or So. However, the integrative tending through penning up as a base can also be done, especially in the locations inhabited by multiethnic society. The development model of the cow farming in the RMPS regions is conducted through three strategies: the short term, the farming for breeding; the mid term, the farming for butchery; and the long term, the farming to produce beef. To apply the development model of the cow farming in the RMPS regions, it is necessary to immediately*

*choose the locations in accordance with the Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW: The Planning of the Region Layout), and it also necessitates the formation of the Executive Board and the Regional Manager, so that the work programs can immediately be prepared.*

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia saat ini sedang berada pada masa transisi, yaitu perubahan dari iklim politik dan pemerintah yang monolitik dan sentralisasi menuju ke arah yang lebih demokratis dalam pelaksanaan otonomi daerah. Tujuan otonomi daerah itu sendiri adalah untuk meningkatkan pelayanan publik melalui demokratisasi, pemberdayaan masyarakat, dan pemanfaatan potensi daerah yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini akan terwujud bila sistem pelayanan publik yang ada direncanakan dan dilaksanakan secara terpadu dan adaptif terhadap tuntutan masyarakat dengan penerapan desentralisasi pembangunan. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penerapan asas desentralisasi pembangunan agar tidak menemui hambatan adalah (Munawar : 2007) : (1) Adanya ketertiban dan kesinambungan pelaksanaan pembangunan yang mensyaratkan perencanaan pembangunan yang komprehensif, (2) Adanya keterbukaan dalam segenap aspek pembangunan sehingga masyarakat mengetahui program apa yang telah, sedang dan akan dilaksanakan. (3) Perlunya partisipasi masyarakat dan (4) Perlunya perencanaan yang strategis dan matang merupakan cara untuk meningkatkan kualitas daerah.

Perubahan sistem pemerintahan daerah menurut UU Nomor 32 tahun 2004 membawa pengaruh besar terhadap wujud, stuktur, kultur dan proses penyelenggaraan pemerintah Daerah. Perubahan bentuk susunan Pemerintah Daerah membawa konsekuensi pula terhadap perubahan kedudukan, kekuasaan dan wewenang Kepala Daerah Provinsi sebagai Daerah otonom maupun sebagai wilayah administrasi, sementara UU tidak mengatur secara tegas akan peran Pemerintah Provinsi. Kewenangan Provinsi secara garis besar menurut UU Nomor 32 tahun 2004 mencakup tiga kewenangan : (1) Kewenangan bidang pemerintah yang bersifat lintas kabupaten dan kota, serta bidang pemerintah tertentu lainnya, yang diatur lebih lanjut dalam PP 25 tahun 2000 sebanyak 108 kewenangan (2) Kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota dan (3) Kewenangan dalam bidang pemerintah yang dilimpahkan kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah.

Dari kewenangan-kewenangan tersebut, maka kewenangan bidang pemerintah yang bersifat lintas kabupaten dan kota merupakan kewenangan yang perlu mendapat perhatian khusus untuk lebih mendukung peran provinsi, fungsi Pemerintah Provinsi akan lebih efektif jika dikelola di tingkat sub-provinsi (regional) dengan anggota lima sampai enam kabupaten/kota, tampaknya lebih realistis untuk diberlakukan saat ini dalam bentuk *regional management*. Namun pengelolaan region atau regional management sebaiknya dikelola oleh orang-orang profesional yang memiliki jiwa kewirausahaan, bukan seorang birokrat.

*Regional Management* yang telah terbentuk saat ini antara lain *Regional Management BARLINGMASCAKEB* (Kerja Sama Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap dan Kebumen), Subosukowonosraten, Kedungsapur, Sapta Mitra Pantura (Sampan), Jonjok Batur ( Kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah dan Lombok Timur ), dll.

Pembentukan manajemen wilayah (*regional management*) merupakan suatu kebutuhan untuk mewujudkan kerjasama pembangunan. Konsep ini tidak hanya difokuskan pada satu sektor saja tetapi disesuaikan dengan potensi yang dimiliki tiap-tiap daerah. Fokus *regional management* adalah sinergi pembangunan antar daerah dengan memberdayakan potensi ekonominya.

Keberadaan Kerjasama antar Pemerintah Kabupaten/Kota sepulau Sumbawa merupakan terobosan penting dalam pembangunan ekonomi regional. Hal ini didasarkan adanya latar belakang bahwa daerah tidak terikat oleh batasan wilayah administratif seperti masa lalu, karena itu RMPS yang meliputi : Kabupaten Sumbawa Barat, Sumbawa, Bima, Dompu, dan Kota Bima, merupakan bentuk kerjasama lebih ke arah kepentingan ekonomi dan bisnis, yaitu menghadirkan investor untuk berinvestasi di wilayah RMPS dan memasarkan potensi wilayah.

Munculnya RMPS sebagai pemikiran dan terobosan baru yang sifatnya lebih luas dalam pengembangan wilayah regional dengan dukungan beberapa Kabupaten/Kota sepulau Sumbawa. Melalui RMPS konsep pembangunan ekonomi secara regional lebih diintensifkan untuk keperluan pemberdayaan potensi – potensi subsektor pertanian pada umumnya dan potensi ternak sapi pada khususnya, namun demikian bukan berarti harus menjadi eksklusif. Sebab pembangunan kerjasama ekonomi antar kawasan, antar provinsi dan antar negara tak terelakkan. Dalam hal ini yang dituju adalah efisiensi dan peningkatan daya saing, juga kemampuan untuk mengelola sumber-sumber lokal agar bisa dimanfaatkan dan sekaligus dapat mengakses ke pasar global.

### **1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan atas latar belakang tersebut di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana wujud kerjasama RMPS dalam upaya mengoptimalkan potensi ekonomi produktif, melalui kebijakan pengembangan pembangunan regional (regional development) ?
2. Bagaimana alternatif model pengembangan pembangunan daerah melalui regional manajemen (RM) ?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui wujud kerjasama RMPS dalam upaya mengoptimalkan potensi ekonomi produktif, melalui kebijakan pengembangan pembangunan regional (regional development).
2. Untuk mengetahui alternatif model pengembangan pembangunan daerah melalui regional manajemen (RM).

### **1.4. Kegunaan Penelitian**

1. Hasil penelitian ini akan dapat dijadikan suatu bahan masukan untuk membuat kebijakan tentang kerjasama ekonomi dan investasi kawasan (*regional management*) yang meliputi semua kabupaten di pulau Sumbawa.
2. Hasil penelitian ini akan dapat digunakan untuk menentukan sektor-sektor apa yang paling strategis untuk dikembangkan dalam rangka kerjasama regional management dan daerah mana yang akan dijadikan pusat-pusat pertumbuhan (*growth centre*) untuk sektor-sektor strategis di pulau Sumbawa.

## **II. LANDASAN TEORI**

### **2.1. Regional Management di Indonesia**

Kebijakan pembangunan regional di Indonesia khususnya yang dilaksanakan di zaman reformasi ini masih cenderung bersifat polarisasi dan sampai saat sekarang ini masih belum tercapai sepenuhnya. Kebijakan polarisasi yang diharapkan mampu menyebarkan kegiatan dan hasil-hasil pembangunan ke seluruh wilayah tanah air tidak mampu menampakkan hasil yang menggembirakan. Justru pada saat sekarang ini telah terjadinya de-polarisasi kegiatan dan hasil pembangunan di Indonesia. Kenyataan ini dipertegas dengan berbagai indikator ekonomi maupun sosial yang menampakkan adanya konsentrasi kegiatan dan hasil pembangunan terbatas di pulau Jawa, Sumatra dan Bali. Secara nyata 2 (dua) indikator ekonomi seperti jumlah uang beredar dan penanaman investasi di

Indonesia didominasi oleh kawasan di pulau Jawa, Sumatra dan Bali. Sedangkan sisanya yang relatif kecil diperebutkan oleh sebagian besar daerah di kawasan timur Indonesia (Tamim, 1996).

Gambaran tentang ketimpangan ekonomi di atas jika tidak diantisipasi secara komprehensif dan integratif akan semakin sulit untuk diatasi. Pada satu sisi era pasar bebas akan membawa konsekuensi pada kebijakan perdagangan bebas dan kebijaksanaan investasi langsung dari luar negeri (foreign direct investment) yang sulit dibatasi oleh kisi-kisi proteksi yang bersifat ekonomis. Akibat selanjutnya dengan mudah diketahui, kawasan barat lebih atraktif akan lebih cenderung tetap menjadi pilihan utama para pelaku ekonomi dan investor dari luar negeri (Anonim, 1996).

Pendekatan Regionalisasi yang dimaksudkan disini tidak terbatas pada pengertian klasik sebagai sebuah konsep *system perwilayahan* yang telah dimulai sejak awal Pelita III oleh Bappenas (Riyadi, 2002:54) atau konsep pengembangan wilayah priode terakhir yang ditandai dengan pendekatan kawasan (Satuan Wilayah Pengembangan/SWP) seperti *Kawasan Pembangunan Ekonomi Terpadu* (KAPET) hingga *Strategic Development Region* (SDR) (Benyamin; 2009:43). Perkembangan pendekatan regionalisasi perlu mendapat perhatian khusus terkait dengan pelaksanaan Otonomi Daerah guna memberikan dorongan terhadap pembangunan daerah dan daerah-daerah sekitarnya melalui kerjasama yang saling menguntungkan.

## **2.2. Growth Pole dan Growth Centre**

Pada awalnya, konsep growth pole (kutub pertumbuhan) yang diperkenalkan oleh Perroux (1955) lebih bersifat ekonomis ketimbang geografis. Perroux menterjemahkan konsepnya ke dalam suatu cakupan kajian tentang *economic space*. Dalam aplikasi konsep pertumbuhan terdapat apa yang dinamakan *industry motrice* atau *propulsive industry* (industri pendorong). Artinya di dalam pengembangan prekonomian suatu daerah dibutuhkan industri pendorong yang mampu menstimulasi perkembangan industri-industri lainnya dalam wilayah tersebut. Walaupun demikian pengembangan prekonomian dengan menggunakan konsep *growth pole* selain membawa manfaat yang positif (*spread effect*) juga mempunyai dampak negatif (*backwash effect*). Sehingga untuk mengoptimalkan keberhasilan pendekatan kutub pertumbuhan ini, upaya kearah mengeliminir *backwash effect* harus dimaksimalkan. Ide dasar ekonomi dari konsep kutub pertumbuhan oleh Perroux dikembangkan lebih jauh dengan menambah kandungan yang terdapat di dalam konsep kutub pertumbuhan yang hanya ada satu *propulsive industry* dengan 3 (tiga) komponen lainnya seperti : (1) Sekelompok industri dinamis mungkin saja terkumpul secara spasial (2) Pengelompokan ini

dapat terjadi di daerah perkotaan (3) Dengan mengutamakan "spill-over effect" diharapkan tidak terjadi melebarnya dampak ekonomi langsung ke tingkat nasional melainkan melalui mekanisme perkembangan 'hinterland' terlebih dahulu.

Sebagai persyaratan terpenuhinya target "spill-over effect" adalah terjaminnya kondisi sebagai berikut : (1) Adanya tingkat pengembangan infrastruktur yang relatif tinggi (2) Secara terpusat disediakannya jasa pelayanan umum dan social dan selanjutnya (3) Terdapat suatu permintaan terhadap tenaga kerja dan sumberdaya lainnya dari pusat pertumbuhan (4) Manfaat konsep kutub pertumbuhan sebagai alat kebijakan dalam perencanaan regional sudah lama dikenal. Di Inggris misalnya pertama kali digunakan tahun 1963 dalam perencanaan *North-East England* dan *Central Scotland*. Pada perkembangannya hampir seluruh bagian wilayah yang ada di Inggris pengembangannya didasarkan pada konsep kutub pertumbuhan.

Sedangkan penerapan konsep pertumbuhan di Negara lain telah menyebar luas baik di daratan Eropa maupun di Amerika Latin. Beberapa contoh yang dikenal dengan kompleks *Industri Baru Toronto-Brindisi* di daerah *Mezzogiorno Italia Selatan*, *Metropoles d'equiliberium' di Prancis* dan pengembangan pusat-pusat baru di Brazilia dan Cuidad Guyana sebagai upaya mendorong pertumbuhan ke dalam daerah-daerah terbelakang di Brazilia dan Venezuela (Allen dan Hermansen, 1971).

Perkembangan selanjutnya, konsep inipun telah mulai diterima dan dimanfaatkan di Amerika Serikat khususnya untuk membantu daerah-daerah yang mengalami kemunduran, demikian juga di Rusia dan India. Terdapat beberapa alasan mengapa konsep ini menarik dan bermanfaat untuk saran kebijakan regional khususnya untuk membantu pengembangan daerah-daerah terbelakang. Alasan-alasan tersebut antara lain : (1) Pada konsep ini terkandung berbagai keuntungan dari suatu agglomerasi, konsep ini cenderung untuk menjadi suatu cara yang sangat efisien untuk menimbulkan perkembangan (2) Dari segi anggaran belanja Negara, pemusatan investasi pada titik-titik pertumbuhan tertentu adalah relatif lebih murah daripada pemberian bantuan besar-besaran kepada daerah-daerah yang besar (3) Spread effect yang ditimbulkan oleh titik pertumbuhan akan membantu memecahkan persoalan-persoalan yang dialami oleh daerah-daerah yang mengalami kemunduran.

### 2.3. Regionalisasi Sub-Regional

Segala bentuk regionalisasi yang terjadi dalam ruang territorial administratif dalam suatu daerah termasuk dalam katagori regionalisasi sub-regional. Karakter khas bentuk regionalisasi ini dapat diamati melalui para *aktor regional* terkait yang berasal dari daerah otonom yang bertetangga. Bentuk

hubungan regionalisasi dalam konsep dapat disebabkan oleh adanya faktor pendorong seperti : hubungan kultural-historis lokal dengan wilayah, homogenitas sektoral yang membutuhkan aliansi potensi, sumberdaya kewilayahan dan aspek lain yang relevan (Benyamin;2009:36).

Pendorong regionalisasi dapat pula dibedakan atas dua isu sentral yang menjadi latar belakang, yaitu *kepentingan* (saling berpengaruh) dan *ketergantungan* (saling bergantung). Kedua aspek tersebut saling berhubungan sehingga sulit untuk dibedakan satu dengan yang lainnya dan terlebih untuk melihat faktor mana yang paling dominan. Yang dimaksud dengan faktor kepentingan disini adalah bagaimana aktor regional melihat manfaat regionalisasi terhadap kepentingan lokal dalam mencapai tujuan pembangunan daerahnya. Sektor terpenting dalam pertimbangan penentuan antar faktor kepentingan dan faktor kebutuhan dapat ditentukan melalui pengamatan *posisi tawar* daerah terhadap wilayah, khususnya dibidang ekonomi. Dengan demikian daerah dengan kondisi ekonominya yang lebih baik akan lebih memiliki faktor *kepentingan* dibanding *kebutuhan* sebagai perekat regional. Faktor ketergantungan dapat diperoleh melalui kajian *hubungan ketergantungan daerah* terhadap wilayah (*local-regional interdependence*). Dengan demikian semakin tinggi tingkat ketergantungan daerah terhadap wilayah menyebabkan meningkatnya faktor pendorong regionalisasi. Semakin kuatnya faktor pendorong regional dalam membangun *kebersamaan* mengakibatkan terbukanya peluang regionalisasi dalam berbagai bentuk, sesuai dengan dinamika pembangunan (Benyamin; 2009:37).

### III. METODE PENELITIAN

#### 3.1. Penentuan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kabupaten / kota se pulau Sumbawa, yang meliputi Kabupaten Sumbawa Barat, Sumbawa, Bima, Dompu, dan Kota Bima. Sesuai tujuan dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini maka jenis penelitian yang akan digunakan bersifat *eksploratif*. Diharapkan melalui penelitian ini akan dapat digali permasalahan-permasalahan yang mendasar yang meliputi : Kekayaan dan potensi-potensi yang secara ekonomi dapat dikembangkan untuk semua daerah di pulau Sumbawa.

#### 3.2. Metode Pengumpulan Data

Metoda pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan *metode khusus*. Metoda ini dimaksudkan adalah terbatas pada hal-hal yang bersifat spesifik. Artinya karena yang diinginkan adalah bagaimana menciptakan suatu kerjasama

(regional management) antar daerah, maka data-data yang akan dikumpulkan untuk dianalisis diambil dari berbagai sumber baik instansi teknis maupun non teknis seperti : BPS, Dinas-dinas Terkait, Bappeda maupun Sekretariat Daerah. Data-data yang akan dikumpulkan terlebih dahulu diverifikasi sesuai dengan tujuan dan tingkat kepentingannya.

#### 3.4. Teknik Pengumpulan Data

- Studi Kepustakaan atau Studi literature yaitu berupaya mencari berbagai sumber informasi baik berupa data-data dari berbagai instansi terkait, guna mendekatkan penelitian dari tujuan penelitian.
- wawancara langsung dengan para perencana di tingkat daerah yang diharapkan dapat memberikan masukan-masukan dengan berpedoman pada interview guide yang telah dipersiapkan.

#### 3.5. Teknik analisis

Setelah data terkumpul maka selanjutnya dilakukan analisis data. Adapun alat analisis data yang digunakan adalah Trend dengan *metoda least square*, dan berapa alat analisis ekonomi regional seperti metoda overly, proxy, dan komparasi.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1. Karakteristik Sumberdaya di Wilayah RMPS.

Sudah tidak dapat dipungkiri lagi jika setiap daerah ingin memacu pertumbuhan ekonominya, maka harus memberikan perhatian lebih dalam penyediaan sarana dan prasarana pendukung, baik yang bersifat fisik maupun non fisik agar dapat menjadi daya tarik para investor untuk datang ke masing-masing daerah. Selama ini pemerintah daerah telah banyak melakukan kegiatan atau melakukan roadshow dalam memasarkan potensi daerah, utamanya sumberdaya alam ke berbagai daerah bahkan luar negeri. Namun jika pemerintah daerah kurang dalam menyediakan infra dan supra struktur pendukung, maka hasilnya kurang optimal. Terutama pada tataran implementasi kebijakan di berbagai lintas sektoral sangatlah perlu diaktualisasikan dalam bentuk debirokratisasi maupun efisiensi dan efektivitas agar tidak tercipta *high cost investment*. Lebih lanjut akan disajikan bagaimana Tata Guna Lahan di Wilayah RMPS akan disajikan melalui tabel berikut.

Tabel. 4.1. Tata Guna lahan di Wilayah RMPS Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2008 (ribuan Ha)

Kabupaten/Kota	Sawah Teknis	Sawah Non Teknis	Padang Rumput	Ladang/Huma	Lainnya	Jumlah
Sumbawa Barat	4.093	4997	2.610	3.096	170.106	184.902
Sumbawa	17.990	28.883	3.773	9.883	283.289	584.978
Dompu	7.498	11.676	6.526	2.754	204.325	213.605
Bima	13.029	17.592	15.331	4.672	386.702	437.326
Kota Bima	-	19.270	-	9.310	141.830	170.410
<b>Jumlah</b>	<b>42.610</b>	<b>82.418</b>	<b>28.240</b>	<b>29.715</b>	<b>1.186.252</b>	<b>1.591.221</b>

Sumber : Kabupaten/Kota dalam Angka Tahun 2008 (diolah).

Dari tabel di atas dapat diinformasikan bahwa dari lima Kabupaten/Kota yang ada di wilayah RMPS ternyata empat Kabupaten diantaranya (KSB, Sumbawa, Dompu dan Kabupaten Bima) memiliki potensi padang rumput/padang penggembalaan yang cukup luas kecuali Kota Bima yang tidak ada. Demikian pula dengan ladang/huma yang relatif cukup luas dan terdapat di semua Kabupaten/Kota. Potensi ini memberikan gambaran kepada kita akan daya dukung lahan yang cukup potensial untuk dikembangkan guna mendukung pengembangan program sub sektor peternakan khususnya sapi sebagai komoditi andalan di wilayah RMPS. Selanjutnya akan disajikan bagaimana keadaan populasi ternak besar (Kuda, Kerbau dan Sapi) di wilayah RMPS dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel. 4.2. Jumlah Populasi Ternak Besar (Kuda, Kerbau dan Sapi) di Wilayah RMPS Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2006-2008. (ribuan)

No.	Kabupaten/Kota	2006	2007	2008
1	Sumbawa Barat	30.815	34.740	39.162
2	Sumbawa	174.304	186.697	199.971
3	Dompu	64.157	73.701	84.667
4	Bima	94.698	101.377	108.524
5	Kota Bima	6.807	16.363	39.271
	<b>Jumlah</b>	<b>370.781</b>	<b>412.878</b>	<b>471.595</b>

Sumber : Kabupaten/Kota dalam Angka Tahun 2006-2008 (diolah).

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diinformasikan kepada kita bahwa kondisi ternak besar di wilayah RMPS terus mengalami peningkatan dari tahun

ke tahun. Perkembangan jumlah populasi ternak besar selama ini lebih disebabkan karena perkembangan secara alamiah saja. Namun kedepan terkait dengan program BSS (Bumi Sejuta Sapi) yang telah dicanangkan oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat dan telah menjadi RPJM Departemen Pertanian secara nasional hendaknya dipacu melalui introdusir teknologi dan sekaligus pemberdayaan masyarakat dalam mendukung program tersebut di atas. Terlebih lagi jika dilihat dari aspek daya dukung lahan dimana kawasan RMPS memiliki lahan padang rumput/padang penggembalaan seluas 28.240.000 Ha dan lahan ladang/huma seluas 29.715.000 Ha (Tabel 4.1.) yang cukup luas, sehingga baik secara regional maupun secara nasional kawasan RMPS sangat cocok untuk menjadi kawasan pengembangan sub sektor peternakan khususnya pengembangan (pembibitan, penggemukan dan sekaligus pemurnian dan pelestarian) Sapi Bali, baik melalui sistem kandang kolektif maupun melalui sistem penggembalaan.

#### 4.2. Pendidikan di Wilayah RMPS.

Pembangunan manusia yang berkualitas tentunya tidak lepas dari pembangunan di bidang pendidikan. Pulau Sumbawa dengan jumlah penduduk yang relatif cukup besar diharapkan pembangunannya dapat berjalan dengan baik. Sejak diterapkannya kebijakan otonomi daerah pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat sehingga merangsang partisipasi aktif dalam rangka pelaksanaan pembangunan. Pemberdayaan masyarakat dapat diupayakan melalui peningkatan kualitas penduduk salah satunya di bidang pendidikan. Oleh karenanya melalui informasi di bawah ini akan disajikan bagaimana kondisi penduduk dan pendidikan masyarakat di wilayah RMPS akan dapat dilihat melalui tabel di bawah ini.

Tabel. 4.3. Jumlah Penduduk Pulau Sumbawa Menurut Kabupaten di Wilayah RMPS Tahun 2003-2008.

Tahun	KSB	SBW	DOMPU	BIMA	KOTA BIMA
2003	-	371.610	191.729	404.775	116.035
2004	92.405	378.336	199.357	406.788	118.164
2005	89.676	390.172	116.126	407.716	123.477
2006	95.837	403.500	206.414	410.682	126.035
2007	96.117	406.123	208.010	411.923	126.587
2008	99.056	413.869	213.185	416.446	129.843

Sumber : NTB Dalam Angka Tahun 2003-2008 (diolah).

Jika dilihat dari proporsi jumlah penduduk antar kabupaten/kota terlihat jelas konsentrasi penduduk masih berada di kabupaten Sumbawa yang diikuti dengan kabupaten Bima, kabupaten Dompu, kota Bima dan terakhir Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Secara demografis jumlah penduduk yang besar akan dapat menjadi daya dorong (*Push Factor*) dalam proses pembangunan jika sumberdaya tersebut memiliki skill yang diperlukan dalam proses pembangunan. Namun bisa juga menjadi penghambat (*Full Factor*) laju pembangunan, jika pertumbuhan penduduk tersebut tidak dikendalikan. Selanjutnya untuk melihat kondisi sumberdaya manusia di wilayah RMPS ditinjau dari aspek pendidikan dapat kita perhatikan dalam tabel tersebut di bawah.

Tabel. 4.4. Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan di Wilayah RMPS Tahun 2007.

No.	Kabupaten / Kota	Pendidikan Yang di Tamatkan						Total
		Tdk/ Blm. Pernah sekolah	T/B Tamat SD	SD	SMP	SMU	PT	
1	Sumbawa Barat	5,4	22,5	34,0	13,5	21,0	3,6	100,0
2	Sumbawa	4,3	22,8	35,1	16,8	16,9	4,0	100,0
3	Dompu	10,8	25,6	21,1	16,8	20,4	5,2	100,0
4	Bima	4,7	28,3	24,7	17,2	20,1	5,0	100,0
5	Kota Bima	4,4	15,8	17,5	18,7	31,6	11,9	100,0

Sumber : Statistik Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2003-2008

Ditinjau dari sudut pandang pendidikan yang ditamatkan, maka penduduk wilayah RMPS masih tergolong relatif rendah. Kondisi ini digambarkan oleh masih rendahnya persentase penduduk wilayah RMPS yang menamatkan pendidikannya setingkat SMU ke atas. Sebagian besar persentase penduduknya masih berada pada kelompok pendidikan yang ditamatkan setara SMP ke bawah, bahkan persentase angka tidak tamat SD dan tidak pernah sekolah masih tergolong tinggi.

#### 4.3. Ketenagakerjaan di Wilayah RMPS.

Dilihat dari sisi ketenagakerjaan penduduk di wilayah RMPS akan digambarkan melalui kelompok penduduk yang tergolong kedalam angkatan kerja atau penduduk yang berusia 15 Tahun ke atas. Untuk memperjelas bagaimana

struktur ketenagakerjaan di di wilayah RMPS akan dapat disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel. 4.5. Persentase Angkatan Kerja di Wilayah RMPS Tahun 2008.

N0.	Kabupaten / Kota	Angkatan Kerja ( org. )	%
1	Sumbawa Barat	38.628	7,43
2	Sumbawa	174.097	33,43
3	Dompu	79.053	15,18
4	Bima	173.402	33,30
5	Kota Bima	55.539	10,66
	Pulau Sumbawa	520.719	100,0

Sumber : Keadaan Angkatan Kerja Provinsi NTB Tahun 2008 (diolah).

Dari data tabel di atas dapat ditunjukkan bahwa jumlah angkatan kerja berdasarkan analisis angkatan kerja di wilayah RMPS tersebar di berbagai kabupaten/kota. Secara kuantitatif jumlah angkatan kerja terendah tersedia di kabupaten Sumbawa Barat sebesar 7,43 % yang diikuti oleh kota Bima sebesar 10,66 %, kabupaten Dompu sebesar 15,18 %, , kabupaten Bima sebesar 33,30 % dan kabupaten Sumbawa sebesar 33,43 %. Atau dapat dikatakan bahwa berdasarkan data kependudukan Tahun 2008 terdapat sebanyak 40,92 % penduduk di wilayah RMPS tergolong kedalam angkatan kerja produktif.

Disisi lain dari jumlah angkatan kerja yang sudah bekerja di wilayah RMPS tersebut tersebar dan terserap pada berbagai sektor ekonomi produktif. Untuk lebih jelasnya dapat diperhatikan pada tabel di bawah ini.

Tabel. 4.6. Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan di Wilayah RMPS Tahun 2005.

No	Kabupaten / Kota	Pertanian	Industri	Perdagangan	Jasa	Lainnya	Total
1	Sumbawa Barat	41,41	4,30	28,90	14,15	21,24	100,0
2	Sumbawa	53,37	3,59	17,25	15,43	10,36	100,0
3	Dompu	49,53	7,57	15,78	16,26	10,87	100,0
4	Bima	66,02	7,57	11,68	6,85	7,88	100,0
5	Kota Bima	18,50	8,48	22,42	29,36	21,24	100,0

Sumber : BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2007 (diolah)

Dari 5 (lima) sektor ekonomi produktif di wilayah RMPS, jika diamati secara mendalam berdasarkan data tabel di atas nampak dengan jelas bahwa serapan tertinggi angkatan kerja yang berumur 15 tahun ke atas masih didominasi oleh sektor pertanian dalam arti luas. Ini mengindikasikan bahwa masyarakat pulau Sumbawa yang berada di wilayah RMPS masih mengandalkan sektor pertanian sebagai sektor basis dalam menunjang prekonomian masyarakat maupun daerah.

#### **4.4. Perkembangan dan Pertumbuhan PDRB Kab. / Kota di Wilayah RMPS.**

Produk Domestik Regional Brutto merupakan dasar pengukuran atas nilai tambah yang terbentuk akibat adanya berbagai aktifitas ekonomi dalam suatu daerah. Data-data PDRB menggambarkan kemampuan suatu daerah untuk mengelola sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia yang dimiliki suatu daerah untuk menghasilkan suatu produk melalui proses produksi. Selanjutnya akan digambarkan melalui tabel di bawah ini bagaimana keadaan PDRB se Pulau Sumbawa yang terbentuk dari aktivitas ekonomi selama enam tahun terhitung sejak Tahun 2003-2008 dapat dilihat pada tabel 4.7. Dari tabel tersebut dapat diinformasikan baik tingkat perkembangan maupun angka pertumbuhan PDRB di lima Kabupaten/kota se pulau Sumbawa selama enam tahun (2003-2008) nampak terjadi fluktuasi. Dari lima kabupaten/kota tersebut di pulau Sumbawa baik angka perkembangan maupun angka pertumbuhan terendah terjadi di Kabupaten Dompu secara rata-rata sebesar (3,67 persen) yang diikuti oleh Kabupaten Bima (4,48 persen), Kabupaten Sumbawa (4,52 persen), Kota Bima (4,55 persen), dan pertumbuhan tertinggi terjadi di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) sebesar (5,54 persen). Secara konkrit walaupun terjadi perbedaan baik dari segi perkembangan PDRB maupun pertumbuhannya namun perbedaan tersebut relatif kecil. Kondisi ini mengindikasikan bahwa perkembangan dan pertumbuhan aktifitas ekonomi di lima kabupaten/kota tersebut relatif hampir merata terkecuali jika di KSB dimasukkan unsur PT. NNT dalam perhitungan PDRB maka akan terjadi peningkatan yang cukup signifikan seperti yang tertuang dalam tabel berikut.

TABEL : 4.7. Perkembangan dan Pertumbuhan PDRB Kabupaten/Kota di Wilayah RMPS Berdasarkan Harga Konstan Tahun 2000 Selama Tahun 2003-2008

Tahun	KSB		SBW		DOMPU	
	Perkembangan (jt.Rp)	Pertumbuh. (%)	Perkembangan (jt.Rp)	Pertumbuh. (%)	Perkembangan (jt.Rp)	Pertumbuh. (%)
1	2	3	4	5	6	7
2003	297.417,41	4,29	1.312.065,29	4,60	713.766,88	4,61
2004	309.544,23	4,08	1.371.037,82	4,49	727.159,26	1,88
2005	322.902,23	4,32	1.426.289,48	4,03	744.443,41	2,38
2006	345.489,10	6,99	1.493.099,44	4,68	775.004,73	4,11
2007	368.759,30	6,74	1.564.565,67	4,79	813.517,96	4,97
2008	393.968,83	6,84	1.635.264,97	4,52	846.467,75	4,05
Rata-rata	339.680,18	5,54	1.467.053,78	4,52	770.059,99	3,67

BIMA		KOTA BIMA	
Perkembangan (jt.Rp)	Pertumbuh. (%)	Perkembangan (jt.Rp)	Pertumbuh. (%)
8	9	10	11
1.137.974,70	5,82	327.975,48	4,48
1.193.970,25	4,92	341.774,20	4,21
1.210.337,53	1,37	353.422,41	3,41
1.261.886,82	4,26	370.172,30	4,74
1.319.464,63	4,56	392.259,42	5,97
1.398.105,70	5,96	409.737,62	4,46
1.053623,27	4,48	365.890,24	4,55

Sumber : NTB Dalam Angka Tahun 2003-2008 (diolah)

#### 4.5. Struktur Perekonomian Kabupaten / Kota di Wilayah RMPS.

Struktur ekonomi kabupaten/kota se Pulau Sumbawa sangat ditentukan oleh besarnya peranan sektor-sektor ekonomi dalam produksi barang maupun jasa. Struktur yang terbentuk dari nilai tambah yang disumbangkan oleh masing-masing sektor tersebut akan dapat menggambarkan saling ketergantungan setiap kabupaten/kota terhadap kemampuan memproduksi antar sektor ekonomi. Berdasarkan data dalam tabel 4.8 dapat ditunjukkan bahwa sumbangan sektor ekonomi terhadap pembentukan PDRB di Pulau Sumbawa sejak tahun 2003-2008 telah mengalami perubahan secara signifikan. Perubahan kondisi ini ditunjukkan

oleh hampir semua sektor ekonomi atau lapangan usaha yang sekaligus akan menggambarkan telah terjadinya perubahan/ pergeseran struktur ekonomi di masing-masing kabupaten/kota. Keadaan tersebut didukung oleh adanya perubahan pola dan arah prioritas pembangunan yang telah membawa berkembangnya sektor-sektor lain seperti industri pengolahan, bangunan, perdagangan, hotel dan restoran dan sektor jasa sebagai usaha alternatif. Sedangkan sektor pertanian dalam arti luas memang terjadi pergeseran yang relatif kecil bahkan untuk sub sektor tanaman pangan bersifat *negatif*. Artinya ketergantungan masyarakat terhadap sektor tersebut semakin lama semakin tergeserkan oleh sektor-sektor lainnya yang cukup menjajjikan secara ekonomi. Ini digambarkan oleh semakin berkurangnya kontribusi sektor pertanian utamanya sub sektor tanaman pangan terhadap PDRB selama enam tahun.

NO.	LAPANGAN USAHA	KSB		SBW	
		2003	2008	2003	2008
1	2	3	4	5	6
1	PERTANIAN, PETERNAKAN KEHUTANAN, & PERIKANAN	111.730,98	125.209,46	594.714,68	700.533,88
	a. Tanaman Bahan Makanan	69.329,44	72.596,05	348.392,64	387.883,94
	b. Tanaman Perkebunan Rakyat	2.396,45	2.629,09	32.346,28	37.423,37
	c. Peternakan dan Hasil-hasinya	17.705,14	21.618,11	96.831,81	117.616,27
	d. Kehutanan	1.429,10	332,74	4.116,90	973,95
	e. Perikanan	20.870,86	28.033,47	113.027,06	156.627,35
2.	PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	19.836,62	33.456,49	28.075,27	35.406,31
3.	INDUSTRI PENGOLAHAN	9.115,14	11.596,62	55.132,37	70.909,53
4.	LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIH	737,62	1.105,74	5.949,18	8.559,08
5.	BANGUNAN	32.758,05	60.664,18	142.466,52	189.046,55
6.	PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN	59.534,72	80.688,84	221.673,66	301.346,32
7.	PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI	32.097,28	41.363,92	72.994,60	100.961,49
8.	KEUANGAN, PERSEWAAN&JASA PERUS.	7.771,91	10.674,48	36.390,69	46.379,53
9.	JASA-JASA	23.835,09	29.209,11	154.668,33	182.122,29
	J U M L A H	297.417,42	393.968,84	1.312.065,31	1.635.255,98

Sumber : NTB dalam Angka Tahun 2003-2008 (diolah)

DOMPU		BIMA		KOTA BIMA	
2003	2008	2003	2008	2003	2008
7	8	9	10	11	12
349.738,20	351.216,68	603.016,93	728.927,73	78.284,80	728.927,73
201.668,93	227.413,73	405.807,54	500.215,04	62.811,13	500.215,04
32.589,46	37.028,03	20.738,66	23.795,92	783,06	23.795,92
30.948,53	37.410,84	66.365,34	81.654,26	10.429,66	81.654,26
44.875,18	2.198,99	6.329,63	5.989,75	896,57	5.989,75
39.656,09	47.165,08	103.775,76	117.272,76	3.364,37	117.272,76
14.531,14	19.939,00	34.256,49	39.725,38	397,19	39.725,38
27.534,74	34.590,95	32.432,04	38.101,35	11.113,43	38.101,35
2.308,08	3.036,44	2.164,71	2.841,13	2.637,57	2.841,13
41.466,23	57.346,33	70.102,61	83.478,18	21.431,66	83.478,18
115.001,97	155.420,23	165.531,87	215.222,95	55.808,83	215.222,95
40.625,82	56.280,14	74.858,74	101.795,07	50.952,30	101.795,07
32.046,42	59.154,33	30.418,10	36.560,65	15.948,65	36.560,65
90.514,28	109.483,66	125.193,22	151.453,26	91.401,05	151.453,26
713.766,87	846.467,75	1.137.974,71	1.398.105,70	1.137.974,71	1.398.105,70

Sebagai gambaran yang lebih konkrit terhadap telah terjadinya pergeseran struktur ekonomi di kabupaten/kota se pulau Sumbawa selama (2003-2008) akan dapat dilihat dalam tabel 4.9. Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa secara rata-rata distribusi persentase sektor pertanian terhadap PDRB kabupaten/kota se pulau Sumbawa telah terjadi *penurunan* secara signifikan, terkecuali distribusi persentase PDRB yang mengalami *kenaikan* terjadi pada sub-sektor peternakan di dua kabupaten seperti kabupaten Sumbawa dan KSB walaupun masih relatif rendah. Padahal jika kita amati baik dari segi geografis dengan tersedianya ladang penggembalaan yang masih sangat luas maupun dari segi sosio-kultural dimana masyarakat di lima kabupaten/kota ini sudah tidak asing lagi dalam pemeliharaan ternak sejak generasi ke generasi. Oleh sebab itu nampak masih sangat dimungkinkan *sub-sektor peternakan* untuk dikembangkan menjadi komoditi unggulan baik untuk kebutuhan lokal maupun untuk kebutuhan ekspor.

TABEL 4.9 DISTRIBUSI PERSENTASE PDRB KABUPATEN / KOTA DI WILAYAH RMPS ATAS DASAR HARGA KONSTAN TAHUN 2000  
MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2003 - 2008 (PERSEN)

NO.	LAPANGAN USAHA	KSB		SBW		DOMPU		BIMA		KOTA BIMA	
		2003	2008	2003	2008	2003	2008	2003	2008	2003	2008
1	PERTANIAN, PETERNAKAN KEHUTANAN, DAN PERIKANAN	37,57	31,78	46,33	42,84	49,00	41,49	52,99	52,14	23,87	21,35
	a. Tanaman Bahan Makanan	23,31	18,43	26,55	23,72	28,25	26,87	35,66	35,78	19,15	17,12
	b. Tanaman Perkebunan Rakyat	0,81	0,67	2,47	2,29	4,57	4,37	1,82	1,70	0,24	0,22
	c. Peternakan dan Hasil-hasilnya	5,95	5,49	7,38	7,19	4,34	4,42	5,83	5,84	3,18	2,98
	d. Kehutanan	0,48	0,08	0,32	0,05	6,29	0,26	0,56	0,43	0,27	0,21
	e. Perikanan	7,02	7,12	8,61	9,58	5,55	5,57	9,12	8,39	1,03	0,82
2	PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	6,67	8,49	2,14	2,17	2,04	2,36	3,01	2,84	0,12	0,13
3	INDUSTRI PENGOLAHAN	3,07	2,94	4,20	4,34	3,86	4,09	2,85	2,73	3,39	3,35
4	LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIH	0,25	0,28	0,45	0,52	0,32	0,36	0,19	0,20	0,80	0,84
5	BANGUNAN	11,01	15,40	10,86	11,56	5,81	6,77	6,16	5,97	6,53	7,04
6	PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN	20,02	20,48	16,90	18,43	16,11	18,36	14,55	15,39	17,02	18,62
7	PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI	10,79	10,50	5,56	6,17	5,69	6,65	6,58	7,28	15,54	17,55
8	KEUANGAN, PERSEWAAN & JASA PERUS.	2,61	2,71	2,77	2,84	4,49	6,99	2,67	2,62	4,86	5,46
9	JASA-JASA	8,01	7,41	11,79	11,14	12,68	12,93	11,00	10,83	27,87	25,66
	JUMLAH	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

#### 4.6. Kecenderungan Prekonomian Kabupaten/Kota di Wilayah RMPS.

Untuk melihat bagaimana kecenderungan prekonomian di Pulau Sumbawa, akan dianalisis melalui laju pertumbuhan PDRB di lima kabupaten/kota se pulau Sumbawa. Ini perlu dilakukan analisis karena dari laju pertumbuhan PDRB masing-masing kabupaten/kota akan dapat diperoleh suatu gambaran sektor-sektor mana di tiap kabupaten/kota yang memberikan sumbangan yang paling dominan dalam pembentukan PDRB. Untuk lebih jelasnya tentang sektor-sektor apa saja yang memberikan sumbangan paling dominan dalam pembentukan PDRB di lima kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel 4.10. Berdasarkan tabel tersebut dapat diinformasikan bahwa sumbangan sektor pertanian dalam pembentukan PDRB dari tahun 2003-2008 mengalami kenaikan, terjadi pada 3 (tiga) kabupaten di wilayah RMPS yaitu di kabupaten Sumbawa Barat, Dompu dan kabupaten Bima. Sedangkan penurunan terjadi di kabupaten Sumbawa dan kota Bima. Kaitannya dengan pengembangan RMPS sumbangan sub sektor peternakan

terhadap pembentukan PDRB mengalami *kenaikan* terjadi di kabupaten Sumbawa, kabupaten Bima dan kota Bima. Sedangkan *penurunan* terjadi di Kabupaten Sumbawa Barat dan kabupaten Dompu.

Sementara jika kita amati berdasarkan data tahun 2008 Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dapat ditunjukkan bahwa sumbangan sektor/lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB di atas 10 persen disumbangkan oleh sektor bangunan (13,34%), pertambangan (11,45%) dan listrik, gas dan air bersih (10,59%). Sedangkan sektor-sektor lainnya hanya memberikan kontribusi 5 (lima) persen ke bawah. Untuk kabupaten Sumbawa sumbangan sektor listrik, gas dan air bersih memberikan kontribusi terhadap pembentukan PDRB sebesar 6,94%, diikuti oleh sektor bangunan 6,51% dan sektor perdagangan 6,47%. Sedangkan sektor lainnya berada 4 (empat) persen ke bawah. Kabupaten Dompu sumbangan sektor pengangkutan memberikan kontribusi terhadap pembentukan PDRB sebesar 8,46%, diikuti oleh sektor bangunan 6,75% dan sektor keuangan 6,27%. Sedangkan sektor lainnya berada 4 (empat) persen ke bawah. Kabupaten Bima sumbangan sektor listrik, gas dan air bersih memberikan kontribusi terhadap pembentukan PDRB sebesar 6,93%, diikuti oleh sektor pengangkutan 6,86% dan sektor jasa 5,82%. Sedangkan sektor lainnya berada 4 (empat) persen ke bawah. Kota Bima sumbangan sektor keuangan persewaan dan jasa perusahaan memberikan kontribusi terhadap pembentukan PDRB sebesar 7,22%. Sedangkan sektor lainnya berada 4 (empat) persen ke bawah.

TABEL : 4.10 LAJU PERTUMBUHAN PDRB KABUPATEN / KOTA DI WILAYAH RMPS ATAS DASAR HARGA KONSTAN TAHUN 2000  
MENURUT LAPANGAN USAHA  
TAHUN 2003 - 2008 (PERSEN)

NO.	LAPANGAN USAHA	KSB		SBW		DOMPU		BIMA		KOTA BIMA	
		2003	2008	2003	2008	2003	2008	2003	2008	2003	2008
1	PERTANIAN, PETERNAKAN KEHUTANAN, DAN PERIKANAN	3,51	5,38	4,64	3,62	1,03	2,73	6,80	7,20	5,46	3,36
	a. Tanaman Bahan Makanan	3,00	5,40	4,96	2,34	15,72	2,78	8,07	9,45	6,06	3,21
	b. Tanaman Perkebunan Rakyat	2,95	2,14	4,96	2,08	3,55	1,36	2,84	2,69	2,20	2,06
	c. Peternakan dan Hasil-hasilnya	4,97	3,91	3,79	6,46	3,76	3,19	3,72	5,23	3,33	5,03
	d. Kehutanan	3,94	1,88	2,78	0,30	36,12	18,71	4,36	0,89	3,24	3,33
	e. Perikanan	4,60	6,92	4,59	5,17	4,23	4,54	4,93	0,92	2,47	2,62
2	PERTAMBANGAN & PENGALIAN	3,92	11,45	4,53	3,82	7,44	4,75	4,63	0,44	4,85	1,33
3	INDUSTRI PENGOLAHAN	5,11	3,78	5,04	4,27	5,24	3,25	4,64	4,20	4,76	3,74
4	LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIH	1,89	10,59	2,60	6,94	4,97	3,15	4,99	6,93	4,36	1,67

5.	BANGUNAN	4,80	13,34	4,76	6,51	8,09	6,75	5,18	1,13	5,66	5,21
6.	PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN	6,34	5,62	6,19	6,47	9,12	4,91	5,12	5,16	6,19	5,12
7.	PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI	4,63	5,10	4,47	4,80	12,65	8,46	4,57	6,86	6,36	4,69
8.	KEUANGAN, PERSEWAAN& JASA PERUS	4,15	4,20	5,24	4,52	23,59	6,27	3,74	3,99	4,67	7,22
9.	JASA-JASA	1,90	3,44	1,96	2,80	2,30	2,56	1,86	5,82	1,35	4,17
	PDRB/PROD.DOMESE.REG BRUTTO	4,29	6,84	4,60	4,52	4,61	4,05	5,82	5,96	4,48	4,48

Sumber : NTB dalam Angka Tahun 2003-2008 (diolah)

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1. Kesimpulan

1. Pertumbuhan ekonomi di Wilayah RMPS bervariasi dalam kurun waktu (2003-2008). Angka terendah terjadi di Kabupaten Dompu secara rata-rata sebesar (3,67 persen) yang diikuti oleh Kabupaten Bima (4,48 persen), Kabupaten Sumbawa (4,52 persen) dan Kota Bima (4,55 persen), sedangkan pertumbuhan tertinggi terjadi di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) sebesar (5,54 persen). Secara konkrit walaupun terjadi perbedaan baik dari segi perkembangan PDRB maupun pertumbuhannya namun perbedaan tersebut relatif kecil dan hampir merata terkecuali jika di KSB dimasukkan unsur PT. NNT dalam perhitungan PDRB maka akan terjadi peningkatan yang cukup signifikan.
2. Struktur ekonomi di Wilayah RMPS masih didominasi oleh sektor pertanian dalam arti luas. Besarnya kontribusi sektor pertanian pada tahun 2008 di KSB sebesar 31,78 kabupaten Sumbawa sebesar 42,84 %, kabupaten Dompu sebesar 41,49 %, kabupaten Bima sebesar 52,14 % dan terendah di kota Bima yaitu sebesar 21,35 %. Hal ini menunjukkan bahwa di wilayah RMPS masih memiliki struktur prekonomian yang bercorak agraris dan pergeseran struktur ekonominya relatif kecil.
3. Setelah terbentuknya Regional Management Pulau Sumbawa (RMPS) pada bulan Agustus 2006, sektor yang ditetapkan untuk dikerjasamakan adalah sektor pertanian dalam arti luas dan khususnya *sub sektor peternakan*.
5. Dilihat dari beberapa indikator, *tenak sapi* memiliki daya ungkit yang lebih besar dibandingkan dengan ternak besar lainnya (kerbau dan kuda) untuk menumbuhkan perekonomian di wilayah RMPS. Dengan demikian, pada tahap awal kerjasama model Regional Management, ternak sapi cocok untuk dikembangkan di wilayah RMPS.

6. Model usaha mengembangkan ternak sapi di wilayah RMPS dilakukan dengan sistem pengembalaan di Lar atau So. Namun demikian, pola pengelolaan ternak secara terpadu dengan sistem kandang sebagai basisnya juga dapat dilakukan, terutama di lokasi yang huni oleh masyarakat dari multi etnis.
7. Model pengembangan ternak sapi di wilayah RMPS dapat dilakukan dengan tiga strategi, yaitu strategi jangka pendek, jangka menengah, dan strategi jangka panjang. Strategi *jangka pendek* dilakukan dengan usaha peternakan yang ditujukan untuk memproduksi bibit sapi. Strategi *jangka menengah* dilakukan dengan usaha peternakan yang ditujukan untuk memproduksi sapi potong. Sedangkan strategi *jangka panjang* dilakukan dengan usaha peternakan yang ditujukan untuk memproduksi daging sapi.

## 5.2. Saran-saran

1. Untuk mendukung perkembangan ekonomi dan perubahan struktur ekonomi yang terjadi di wilayah RMPS, maka pemerintah daerah hendaknya memberikan perhatian lebih terutama dalam penyediaan sarana dan prasarana pendukung agar para investor tertarik melakukan investasi di wilayah RMPS.
2. Untuk menerapkan model pengembangan ternak sapi di wilayah RMPS perlu segera ditentukan lokasinya sesuai dengan potensi yang dimiliki, serta sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah ( RTRW ) masing-masing kabupaten/ kota.
3. Sosialisasi tentang model pengembangan ternak sapi di wilayah RMPS perlu ditingkatkan di masing-masing kabupaten / kota dan harus segera dibentuk Dewan Eksekutif (DE) dan menetapkan Regional Manager (RM), sehingga program kerja dapat segera disusun.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 1996. Peran BPIS dalam Mendukung Pengembangan KTI, Khususnya Kawasan Tenggara Indonesia sebagai Salah Satu Pusat Pertumbuhan Pembangunan, Makalah pada Simposium Pusat Pertumbuhan Kawasan Tenggara Indonesia , Mataram.
- Abdurahman Benyamin, 2009. Regional Management & Regional Marketing (Pemahaman Dasar) Penerbit : Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kerjasama Antar Daerah (LEKAD).Semarang, Jawa Tengah.
- Agam Fauzi, 2008. Penelitian Pengembangan Kapasitas Daerah (Kajian Peluang Pengembangan & Penguatan Rantai Pemasaran Produk Unggulan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat).

- Bendavid-Val, A.* 1983 Regional and Local Economics Analysis for Practitioners, new and Expanded Edition, Proger Publisher, New York.
- Boudeville, J.* 1966. Problem of Regional economic Planning, Eidenburgh, UP.
- Hill, H., (ed)* 1989. Unity and Diversity. Regional economic Development in Indonesia Since. 1970. Oxforde University Press, Singapore.
- Glasson, Jhon,* 1974. an Intruduction to Regional Planning. IIntcinson of London Dalam Paul Sitohang, 1977. Pengantar Perencanaan Regional Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Kuznets, Simon,* 1955. Economic Grouth and Income Inequality. American Economics Review: 1-28.
- Maskun, Sumitro,* 1966. Kebijakanaksanaan Pengembangan dan Manajemen Pembangunan Untuk Mendukung Pembangunan Daerah di Kawasan Tenggara Indonesia. Makalh pada Simposium Pusat Pertumbuhan Kawasan Tenggara Indonesia, Mataram NTB.
- Muthalib, H. Abdul,* 2008. Potensi Sumberdaya Ternak Kerbau di Nusa Tenggara Barat, Litbang Departemen Pertanian Provinsi NTB.
- Richardson, W. Harry.* 1975. Element of Regional Economic. Penerbit Penguin books Ltd Dalam Paul Sitohang, 1977 Dasar-Dasar ilme Ekonomi Regional, Penerbit Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI), Jakarta.
- Sondkh Lucky W,* 1996. Desentralisasi dan Pembangunan Masyarakat. Dalam Seminar Internasional NGO Forum On Indonesia Development, Cimacan Cisarua, Jawa Barat, 6-8 September 1996.
- Tamim Faesal,* 1996. Kebijakanaksanaan Pengembangan dan Manajemen Pembangunan Untuk Kawasan Tenggara Indonesia. Makalah pada Simposium Pusat Pertumbuhan Kawasan Tenggara Indonesia, Mataram.